



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL (BKPM)

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWAN SURYANA
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 87648

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m²/200 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m²/80 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 1.000.000.000
5. Tanah Seluas 77 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 577.500.000
6. Tanah Seluas 23 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 172.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 375.500.000

1. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000
4. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.



250.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	21.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	5.440.116.697
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	847.310.576
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.433.927.273
III. HUTANG	Rp.	650.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.783.927.273

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi penuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.